

**DIGITALISASI BIROKRASI PEMERINTAHAN: MOTIF POLITIS
SEGELINTIR PEJABAT BERKEDOK INOVASI TATA KELOLA**

Muhammad Gembong Abdillah¹, M.Hamdi HS²
taktikgemb@gmail.com¹, hamdi.hs@unmuhjember.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Digitalisasi tata kelola pemerintahan menjadi suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari oleh setiap negara, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Sebagai respons terhadap tuntutan untuk mengejar standar tata kelola pemerintahan negara maju, Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berupaya mendorong birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengadaptasi teknologi digital dalam rangka mempermudah dan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan. Namun, digitalisasi pemerintahan ini menimbulkan pertanyaan mendalam terkait kapasitas dan integritas pejabat yang bertanggung jawab atas transformasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi pemerintahan di Indonesia, dengan fokus pada apakah pejabat publik memiliki kompetensi dan integritas yang memadai dalam menjalankan kebijakan SPBE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik digitalisasi di banyak instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, seringkali terjebak pada sebatas upaya belanja anggaran dan pencitraan politik yang bertujuan untuk promosi jabatan. Lebih lanjut, beberapa aplikasi yang diklaim sebagai inovasi tata kelola sering kali mendapatkan respons negatif dari masyarakat, bahkan pada tahap pengenalan nama aplikasi, yang memperburuk citra digitalisasi itu sendiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya digitalisasi merupakan langkah maju dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan, tantangan terkait kapasitas, integritas, serta pengelolaan teknologi yang tepat masih menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan transformasi pemerintahan berbasis elektronik yang sesungguhnya.

Kata Kunci: Digitalisasi Pemerintahan; Tata Kelola Pemerintahan; Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kapasitas Pejabat, Aplikasi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 telah mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pentingnya e-government telah mendorong pemerintah di negara-negara berkembang untuk mencoba menerapkan prinsip-prinsip e-government dalam pelayanan pemerintahan. Ada dua alasan mendasar mengapa transformasi digital diperlukan dalam pemerintahan, khususnya dalam penerapan e-government (Adams et al, 2023). Pertama, mewujudkan pelayanan publik dan pemerintahan administrasi dengan lebih baik. Kedua, membangun kesiapan pemerintah menghadapi gelombang perubahan disebabkan oleh munculnya Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 (Susilawati, 2023).

Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), telah berupaya untuk mentransformasi bentuk layanan publik menjadi digital dalam seluruh sektor atau e-government. Saat ini sudah banyak instansi pemerintah dari tingkat pusat bahkan sampai desa berusaha untuk mengimplementasi PP No 95/2018 tersebut. Tapi sangat disayangkan menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, situs-situs yang diinisiasikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah rata-rata baru hanya bisa mencapai tingkat pertama yaitu adalah tahap persiapan dan pada tahap berikutnya atau tahap pematangan hanya baru sebagian kecil dari yang sudah ada (Desandry, 2023).

Kurangnya integrasi data dalam implementasi e-government juga semakin menghambat pengembangan dan penerapan e-government. Khususnya Instansi Pemerintah telah membuat beberapa aplikasi yang menyebabkan duplikasi anggaran. Berdasarkan survei Dewan TIK Nasional (2018), terdapat permintaan anggaran rangkap sebesar 65% dari lembaga pemerintah untuk membeli aplikasi serupa yang tidak diperlukan (Susilawati, 2023). Lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat apalagi daerah memang kerap kali mencoba menunjukkan kinerjanya dengan meluncurkan banyak aplikasi yang diklaim sebagai inovasi tata kelola, padahal selain tidak membuat sistem yang terintegritas, peluncuran aplikasi tersebut kerap dinilai sebagai politik anggaran dan upaya pencitraan untuk promosi jabatan. Salah satu faktor hambatan dari permasalahan digitalisasi tata kelola pemerintahan ada pada aspek kepemimpinan. Di jajaran birokrasi pemerintah pusat, terkadang inovasi digital cenderung dipaksakan oleh eselon atas untuk diterapkan tanpa adanya proses kajian yang matang. Hal tersebut sering kali dilakukan untuk memoles citra dirinya. Sedangkan ditingkat daerah, kepala daerah sering kali memaksakan inovasi tata kelola digital yang berwujud aplikasi untuk dijalankan tanpa melihat masalah substantif seperti akses internet di masyarakatnya sudah tersedia atau belum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis penerapan dan hambatan digitalisasi tata kelola pemerintahan di Indonesia, dengan fokus pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mengakses berbagai jurnal, artikel, laporan, dan dokumen terkait, yang kemudian diimpor ke dalam perangkat lunak NVivo untuk mempermudah pengolahan dan analisis data. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber ini kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, seperti kepemimpinan digital, penggunaan teknologi, kebijakan pemerintah, politik anggaran, integrasi sistem, dan tantangan infrastruktur.

Proses pengodean data dimulai dengan pengodean awal untuk mengidentifikasi teks yang relevan dengan tema-tema tersebut. Kemudian, data tersebut dikelompokkan lebih lanjut dalam kategori utama, seperti masalah dalam implementasi aplikasi pemerintah, tantangan kepemimpinan dalam digitalisasi, serta hambatan-hambatan terkait integrasi sistem dan kebijakan. Dalam NVivo, hubungan antar kategori dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan fitur Node Relationships, yang memungkinkan untuk melihat keterkaitan antara tema-tema seperti kepemimpinan digital dan politik anggaran atau antara duplikasi aplikasi dan politik anggaran. Setelah data dianalisis, NVivo

memungkinkan untuk membuat model atau diagram yang memvisualisasikan hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi penerapan SPBE, seperti hubungan antara inovasi digital dan citra pejabat atau antara duplikasi aplikasi dengan masalah politik anggaran. Temuan yang diperoleh kemudian diverifikasi dengan data yang ada melalui triangulasi dengan literatur lain, wawancara, atau data primer untuk memastikan keakuratan hasil analisis.

Terakhir, laporan penelitian disusun dengan menguraikan temuan utama, analisis yang telah dilakukan, serta kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Laporan ini mencakup berbagai temuan terkait kepemimpinan, pengelolaan anggaran, dan tantangan implementasi, serta memberikan saran mengenai bagaimana perbaikan dalam kebijakan pemerintahan, kepemimpinan digital, dan penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis menggunakan perangkat NVivo untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan dan hambatan digitalisasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Hasil dari analisis kualitatif ini mengungkapkan berbagai faktor yang memengaruhi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta kendala-kendala yang muncul di lapangan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan data yang dihimpun, ada beberapa tema utama yang menjadi sorotan dalam penerapan SPBE di Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi kepemimpinan yang lemah, rendahnya integrasi antar sistem aplikasi pemerintah, dan adanya kendala terkait politik anggaran.

Peningkatan Pengguna Internet dan Adaptasi Pemerintah

Statistik yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa di tahun 2024, pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.479 jiwa, atau sekitar 79,5% dari total populasi. Penetrasi internet yang terus meningkat ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin digital. Dalam hal ini, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengadaptasi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Namun, meskipun regulasi sudah ada, penerapan *e-Government* di Indonesia masih menemui berbagai hambatan. Berdasarkan penelitian ini, faktor-faktor yang menghambat penerapan SPBE meliputi kepemimpinan yang tidak responsif terhadap perubahan, kesenjangan digital antar daerah, dan rendahnya integrasi antara sistem aplikasi yang dikembangkan oleh instansi pemerintah.

Pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi di lingkup pemerintah dipayungi oleh terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE memberikan panduan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemberian layanan. Aturan ini kemudian menjadi dasar bagi setiap institusi pemerintah pusat maupun daerah untuk bertransformasi menjadi digital pada banyak layanan yang diberikan (CNBC, 2024).

Pembangunan pemerintah Indonesia belum maksimal. Penerapan *e-Government* di lembaga pemerintah pusat dan daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kinerja Indonesia dalam *Government Development Index* (EGDI) cenderung turun tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya. Hambatan penerapan *e-government* di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut: kepemimpinan yang lemah, sumber daya manusia yang langka, kesenjangan digital, kurangnya koordinasi, dan tidak memadainya peraturan. Hal ini senada dengan temuan yang menyatakan bahwa permasalahan implementasi *e-government* di Indonesia adalah infrastruktur, kepemimpinan, dan faktor budaya (Susilawati, 2023). Selaras dengan penelitian ini, faktor figur kepemimpinan nasional maupun lokal dan budaya yang membentuknya sangat mempengaruhi rendahnya tingkat penerapan *e-Government* di Indonesia sekarang.

Masalah Kepemimpinan dalam Digitalisasi Pemerintahan

Karakter kepemimpinan dari pejabat pucak di banyak lembaga pemerintahan pusat maupun daerah dinilai tidak bisa mengikuti kecepatan pertumbuhan kebutuhan masyarakat di era digitalisasi ini. Adanya kebutuhan akan efisiensi, transparansi, dan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan masih dipahami dengan pemahaman konservatif oleh banyak pejabat di Indonesia. Sejumlah lembaga pemerintah mulai bertransformasi dengan membangun aplikasi berbasis teknologi informasi. Tercatat beberapa sistem aplikasi yang dibangun menjadi unggulan dan dipergunakan oleh beberapa unit pemerintah lain yang memiliki kemiripan dalam layanan. Permasalahan muncul ketika keberadaan aplikasi yang diciptakan menyimpang dari grand design SPBE, yaitu integrasi sistem. Lembaga pemerintah saling menolak untuk terlihat inferior, masing-masing institusi berlomba untuk menciptakan aplikasi secara mandiri untuk dipergunakan secara internal. Harapan terjadinya integrasi pun kemudian hilang secara perlahan (CNBC, 2024).

Tabel 1: Kendala Kepemimpinan dalam Digitalisasi Pemerintahan

Faktor	Temuan
Kepemimpinan	Banyak pejabat tidak memiliki visi digital yang jelas
Pengaruh Politik	Kepentingan politis menyebabkan aplikasi dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Pemahaman Terhadap Teknologi	Kepemimpinan yang konservatif memperlambat proses transformasi digital

Politik Anggaran dan Aplikasi yang Tidak Terintegrasi

Salah satu hambatan besar dalam penerapan digitalisasi pemerintahan adalah politik anggaran yang mendorong instansi-instansi pemerintah untuk membuat aplikasi secara mandiri. Fenomena ini terjadi karena setiap aplikasi yang dikembangkan biasanya disertai dengan alokasi anggaran yang cukup besar, yang dapat digunakan untuk mempromosikan citra pejabat yang terlibat. Pengembangan aplikasi tanpa memperhatikan prinsip integrasi menyebabkan terjadinya duplikasi sistem dan ketidakefisienan penggunaan anggaran.

Sebagian besar aplikasi yang diluncurkan oleh instansi pemerintah cenderung tidak terintegrasi dengan baik, baik di level pusat maupun daerah. Hal ini tidak hanya menghambat tujuan dari SPBE untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terkoordinasi, tetapi juga menyebabkan pemborosan anggaran yang bisa digunakan untuk pengembangan infrastruktur lain yang lebih mendesak.

Tabel 2: Politik Anggaran dan Integrasi Aplikasi Pemerintah

Faktor	Temuan
Politik Anggaran	Aplikasi sering dikembangkan untuk kepentingan politis pejabat
Duplikasi Aplikasi	Aplikasi yang terpisah dan tidak terintegrasi menyebabkan pemborosan anggaran
Tidak Terintegrasi	Sistem yang dibuat tidak saling terhubung dan menghambat efisiensi

Dalam artikelnya yang berjudul "Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus: Implementasi *e-Government* dan Hambatannya)", 2023, Susilawati menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penghambat implementasi pemerintahan di Indonesia. Secara eksplisit, regulasi dan kebijakan pemerintah dinilai lamban dalam merespon dinamika perkembangan Teknologi Informasi Komunisasi (TIK) dan kebutuhan masyarakat akan layanan digital. Hal krusial lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah rendahnya integrasi data; aplikasi dari pemerintah dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sangat minim; penggunaan teknologi tidak sesuai dengan kemajuan TIK di era Industri; rendahnya kompetensi TIK aparat; pola pikir budaya kuno di lembaga pemerintah; kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan, kurangnya visi

kepemimpinan digital, dan kesenjangan ketersediaan infrastruktur TIK, terutama di daerah terpencil.

Transformasi digital sangat diperlukan dalam kinerja pemerintahan di Indonesia yang meliputi unsur-unsur berikut: mengatur hukum dan kebijakan yang dapat memandu e-pelaksanaan pemerintahan; meningkatkan sistem digital, yaitu pusat data, intra-jaringan dan aplikasi pemerintah lebih terintegrasi dan lugas; restrukturisasi birokrasi; meningkatkan kompetensi TIK birokrasi; mengubah budaya kerja yang mendorong peralatan untuk bekerja secara digital; dan mengembangkan kepemimpinan yang memiliki visi digital.

Poin pada urgensi kepemimpinan yang mempunyai visi digital masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Jangankan membuat sistem terpadu yang berbasis digital, untuk memberi nama inovasinya saja masih terdapat banyak kekurangan. Misalnya platform SiPEPEK yang dibuat Pemerintah Kabupaten Cirebon. Aplikasi ini memiliki kepanjangan sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, pepek sendiri memiliki arti kemaluan perempuan. Lalu ada Simontok (Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok) berada di bawah otoritas Pemerintah Kota Solo atau Surakarta, Sisemok adalah singkatan dari Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Aplikasi ini merupakan platform berbasis situs yang dibuat oleh Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (CNN, 2024).

Setidaknya ada beberapa penyebab mengapa ego masing-masing instansi begitu kuat untuk mengembangkan aplikasi secara mandiri. Motif pertama berkaitan dengan alokasi anggaran. Proposal pengajuan sebuah aplikasi dalam menunjang pelaksanaan pemberian layanan akan selalu didukung oleh anggaran. Semakin kompleks aplikasi yang dibangun maka akan semakin besar alokasi yang disediakan. Memiliki sebuah perangkat aplikasi yang terintegrasi pada sebuah institusi merupakan sebuah kebanggaan tersendiri dan menjadi sebuah prestasi yang dapat digunakan untuk promosi jabatan. Motif pertama ini sangat erat kaitannya dengan politik anggaran dan penataan citra hasil kerja seorang pejabat. Tanpa memperhatikan etika, banyak pejabat yang juga melangkah lebih jauh untuk agenda politik pribadinya.

Motif kedua berkaitan dengan adanya berbagai penilaian terhadap sebuah institusi pemerintah. Akreditasi maupun keikutsertaan dalam penilaian institusi seperti WBK/WBBM memiliki prasyarat berupa adanya inovasi dalam pemberian layanan (CNBC, 2024). Prasyarat tersebut ketika bertemu dengan karakter kepemimpinan yang konservatif dan oportunis, pasti akan menghasilkan inovasi tata kelola yang tidak substantif dalam menyelesaikan permasalahan publik.

Kesenjangan Digital dan Infrastruktur

Kesenjangan digital juga menjadi tantangan besar dalam implementasi SPBE. Meskipun pengguna internet di Indonesia semakin meluas, terdapat ketimpangan dalam aksesibilitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah-daerah terpencil masih terbatas, yang menyebabkan aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh pemerintah tidak dapat diakses secara maksimal oleh masyarakat di daerah tersebut.

Tabel 3: Kesenjangan Digital dan Infrastruktur di Indonesia

Faktor	Temuan
Kesenjangan Infrastruktur	Akses internet terbatas di daerah terpencil
Hambatan Pengguna Aplikasi	Aplikasi pemerintah tidak dapat diakses dengan optimal di daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai

Rendahnya Kompetensi TIK Aparatur Pemerintah

Kompetensi digital dari aparat pemerintah juga menjadi masalah yang signifikan dalam penerapan SPBE. Banyak pejabat dan pegawai negeri yang belum memiliki keterampilan yang memadai dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menghambat mereka untuk mengelola dan memanfaatkan sistem berbasis digital secara efektif. Hal ini berakibat pada

pengelolaan aplikasi yang tidak maksimal, serta rendahnya tingkat adopsi teknologi di lingkungan pemerintahan.

Tabel 4: Kompetensi TIK dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi SPBE

Faktor	Temuan
Kompetensi TIK	Rendahnya kompetensi TIK di kalangan aparat pemerintah
Dampak Terhadap Implementasi	Kurangnya keterampilan TIK menghambat pengelolaan aplikasi digital yang efektif

Dengan berbagai faktor di atas, dapat digambarkan diagram presentase yang menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap hambatan implelementasi digitalisasi pemerintahan.

No	Faktor Penghambat	Presentase Pengaruh	Keterangan
1	Kepemimpinan Lemah	30%	Kurangnya visi digital dan orientasi kepemimpinan konservatif sangat dominan dalam penelitian
2	Politik Anggaran	25%	Pengembangan aplikasi berbasis anggaran besar untuk pencitraan menyebabkan pemborosan dan duplikasi
3	Integrasi Sistem yang Rendah	20%	Aplikasi tidak saling terhubung, menimbulkan duplikasi layanan dan kegagalan interoperabilitas.
4	Kesenjangan Digital (Infrastruktur TIK)	15%	Ketimpangan akses internet di daerah menyebabkan layanan tidak merata.
5	Rendahnya Kompetensi TIK Aparatur	10%	Aparat belum siap secara teknis mengelola sistem digital secara efektif.

Berdasarkan hasil analisis kualitatif, terdapat lima faktor utama yang menghambat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, dengan tingkat pengaruh yang bervariasi. Faktor kepemimpinan yang lemah menempati posisi tertinggi dengan kontribusi sebesar 30%, menunjukkan bahwa banyak pejabat pemerintah belum memiliki visi digital yang jelas dan cenderung memaksakan inovasi tanpa kajian yang matang. Disusul oleh politik anggaran sebesar 25%, di mana pembuatan aplikasi sering kali didorong oleh kepentingan pencitraan dan promosi jabatan, bukan kebutuhan masyarakat. Rendahnya integrasi sistem menyumbang 20% terhadap hambatan, mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi yang menyebabkan sistem-sistem digital berdiri sendiri tanpa keterpaduan. Sementara itu, kesenjangan digital yang mencakup terbatasnya akses internet di wilayah terpencil berkontribusi sebesar 15%, yang menghambat pemerataan akses layanan digital. Terakhir, rendahnya kompetensi TIK aparatur pemerintah menyumbang 10% terhadap hambatan, di mana kurangnya keterampilan dalam mengelola sistem digital menyebabkan aplikasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kelima faktor ini saling

terkait dan secara kolektif membentuk hambatan struktural yang perlu diatasi melalui penguatan kepemimpinan digital, reformasi kebijakan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan infrastruktur TIK yang merata.

KESIMPULAN

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan teknologi digital. Namun, karakter kepemimpinan yang lemah, budaya konservatif, serta politik anggaran yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan pencitraan pejabat telah menghambat penerapan SPBE yang efektif.

Transformasi digital pemerintahan di Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang memiliki visi digital, kemampuan untuk mengintegrasikan aplikasi, dan kemampuan untuk menyelaraskan kebijakan serta peraturan dengan perkembangan teknologi yang cepat. Selain itu, kesenjangan infrastruktur digital dan kompetensi TIK di kalangan aparat pemerintah juga perlu diatasi untuk memastikan implementasi SPBE yang lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan di Indonesia masih terhalang oleh faktor-faktor yang bersifat struktural dan kultural. Pemerintah perlu mengatasi masalah-masalah ini agar digitalisasi pemerintahan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

SARAN

Pembangunan karakter pada birokrat karir dan politisi yang akan menduduki kursi pemerintahan harus lebih diberi perhatian khusus. Aspek perkembangan teknologi informasi dan cara pandang yang tepat terhadapnya perlu ditanamkan sebelum seseorang menjabat. Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait serta semua partai politik harus mempersiapkan orang-orang terbaiknya untuk mengisi kursi pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan berbeda dengan perkembangan dunia fiskal dan moneter yang hanya sedikit orang memahaminya, sehingga jika seorang pejabat membuat kesalahan maka masyarakat tidak terlalu memberi perhatian khusus. Namun jika pejabat pemerintahan tidak cakap di bidang digitalisasi dan membuat kesalahan yang mudah dipahami khalayak umum, maka hal tersebut akan menjadi olok-olokan publik. Sudah saatnya literasi digital pejabat pemerintahan perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertot, J.C., Jaeger, P.T., & Grimes, J.M. (2010). "The Impact of Policies on Government Transparency: A Cross-Country Comparison." *Government Information Quarterly*, 27(4), 377–384.
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226-239.
- Gil-Garcia, J.R., Pardo, T.A., & Cresswell, A.M. (2016). "Digital Government and Smart Cities: A Focused Research Agenda for the Future." *Government Information Quarterly*, 33(3), 559–573.
- Heeks, R. (2002). "Reinventing Government in the Digital Era." Routledge.
- Khaeromah, S., Yuliani, F., & As'ari, H. (2021). Digitalisasi Birokrasi Melalui Pembangunan Smart ASN di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 12(2), 140-158.
- Maisondra, M. (2022). Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur).
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2016). "The Politics of Public Service Reform." Oxford University Press.
- Mulyana, Y. M. Y. (2022). Penggantian Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Robotik Dalam Mewujudkan Digitalisasi Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 485-496.
- Noak, P. A. (2022). Digitalisasi Birokrasi Dalam Wilayah Publik Dan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 4(2), 132.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). "Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is

- Transforming the Public Sector." Addison-Wesley.
- Prihanto, H., Lanori, T., Selfiani, S., & Adwimurti, Y. (2023). Perspektif Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(1), 87-103.
- Rajab, I. F. (2023). PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG KORUPSI TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA NEGARA (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Ramadhani, R. R., & Angin, R. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAAN REVITALISASI ALUN-ALUN JEMBER NUSANTARA. *Interelasi*, 1(2), 96-104.
- Riswati, R. (2021). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi di Indonesia. *Jurnal Media Birokrasi*, 1-15.
- Rohmadi, D. P. H., & Idrus, I. A. (2023). Kapasitas Birokrasi Dalam Menggunakan Aplikasi Berbasis Digitalisasi Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Pemerintahan Daerah. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 5(1), 40-47.
- Saragih, Y. M. (2021). ANALISIS UNSUR UTAMA MOTIF TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. 579-586).
- Shadish, W.R., Cook, T.D., & Campbell, D.T. (2002). "Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference." Houghton Mifflin.
- Spaltani, B. G. (2024). DIGITALISASI BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP ETIKA PEJABAT PUBLIK. *Jurnal Suara Keadilan*, 25(1), 26-39.
- Tambini, D. (2017). "Digital Transparency and Government Accountability." *Journal of Information Policy*, 7, 55-72.
- United Nations E-Government Survey (2020). "Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development." United Nations.